



Kementerian PPN/
Bappenas



PROSPERA

Program Kemitraan Indonesia
Australia untuk Perekonomian

Serial Analisis Kebijakan Makro Fiskal Kualitas Belanja Transfer ke Daerah

Deputi Bidang Ekonomi

14 September 2023





Kementerian PPN/
Bappenas



PROSPERA
Program Kemitraan Indonesia
Australia untuk Perekonomian

Kata Pengantar

Dalam era pembangunan saat ini, peningkatan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) telah menjadi fokus utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Saat ini, besaran alokasi TKD mencapai satu per tiga dari komposisi alokasi belanja negara. Meskipun alokasi TKD terus mengalami peningkatan, namun perlu disadari bahwa tanpa disertai perbaikan kualitas belanja daerah, dampak yang diharapkan dari peningkatan tersebut tidak dapat dicapai secara optimal.

Dengan kondisi masih rendahnya kemandirian fiskal, kualitas belanja daerah merupakan faktor krusial dalam upaya mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis harus diambil untuk memastikan bahwa alokasi TKD diarahkan untuk membiayai program-program yang mendukung sektor pembangunan terkait pelayanan dasar, diantaranya: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur.

Sebagai upaya untuk meningkatkan dampak belanja TKD terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, maka Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas bersama dengan Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian (Prospera) melakukan kajian "Kualitas Belanja Transfer ke Daerah". Beberapa hal menjadi temuan utama dalam kajian ini diantaranya transfer yang ditentukan penggunaannya (earmarked) cenderung memberikan dorongan yang lebih besar terhadap total belanja, terutama pada jenis belanja yang bersifat produktif, seperti belanja modal. Sebaliknya, transfer yang tidak ditentukan penggunaannya (non-earmarked) memberikan dampak yang lebih besar kepada jenis belanja operasional, yaitu belanja pegawai dan barang dan jasa. Selain itu, PAD belum sepenuhnya termanfaatkan untuk mendorong belanja daerah yang produktif. Temuan lainnya memperlihatkan bahwa kualitas belanja daerah belum optimal dalam meningkatkan capaian indikator IPM dan memiliki dampak yang moderat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Pemerintah Pusat dan Daerah secara kolaboratif perlu meningkatkan kualitas belanja TKD untuk mengakselerasi peningkatan capaian target sosial ekonomi di daerah. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan terhadap pemanfaatan DAU kepada pos-pos belanja yang bersifat produktif, serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan prioritas nasional. Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga dapat membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi kualitas belanja Pemda guna memastikan kemanfaatannya bagi masyarakat. Pemerintah juga dapat merumuskan petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan serta APBD di daerah sehingga dapat memastikan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Semoga dengan hadirnya Booklet kajian "Kualitas Belanja Transfer ke Daerah" ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi dalam rangka perbaikan kualitas belanja dan menjadi basis empiris bagi Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan, utamanya untuk: peningkatan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peningkatan keselarasan strategi, dan pelaksanaan proyek prioritas dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas belanja daerah yang berorientasi pada pemenuhan standar pelayanan publik dan bersifat produktif sehingga mampu memberikan multiplier effect yang tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan perekonomian.

Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSi, M.Eng. Ph.D

Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas

Kata Pengantar

Dua dekade telah berlalu sejak Indonesia menerapkan desentralisasi yang ‘big-bang’ sehingga mengubah tatanan fiskal Indonesia. Indonesia telah mendelegasikan kewenangannya untuk sebagian besar penyediaan layanan publik dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Perubahan penting ini dimulai dengan penerapan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Secara bersamaan, UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperkenalkan untuk mengatur pembiayaan yang menjadi tanggung jawab anggaran Pemerintah Daerah.

Saat ini, Pemerintah menerapkan UU No. 1/2022 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja. Salah satunya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan kembali untuk mendukung standar pelayanan minimum, dari tujuan sebelumnya untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Kajian bersama antara Bappenas dan Prospera ini memberikan bukti empiris yang mendukung arah kebijakan pemerintah dalam penguatan kualitas belanja melalui transfer. Kajian ini memberikan pandangan empiris yang mendukung komitmen pemerintah terhadap peningkatan kinerja Transfer ke Daerah (TKD). Kajian ini menilai pelaksanaan transfer saat ini, identifikasi masalah, dan pemetaan perubahan kebijakan yang diperlukan.

Kajian ini menggunakan analisis secara bertahap untuk melihat dampak TKD terhadap pertumbuhan indikator sosial-ekonomi di daerah selama 2017 hingga 2021. Kajian ini berfokus pada analisis dampak TKD terhadap total belanja daerah dan belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar; dampak belanja daerah terhadap indikator outcome dan output sektoral; dan menghitung multiplier effect belanja daerah terhadap perekonomian daerah. Hasil dari kajian ini memperlihatkan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih perlu ditingkatkan dan belanja modal yang bergantung pada transfer khusus dibandingkan dengan transfer umum. Temuan ini mendukung pentingnya perubahan mekanisme DAU pada UU No. 1/2022, dimana sebagiannya dialokasikan untuk belanja yang diwajibkan, khususnya bagi Pemerintah Daerah dengan kinerja tertentu.

Kajian ini juga mengungkapkan beberapa indikator standar layanan menunjukkan bahwa komposisi belanja membantu menjelaskan kinerja belanja di seluruh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang memfokuskan belanjanya untuk pelayanan terkait kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Sebaliknya, Pemerintah Daerah yang mengalokasikan belanja lebih banyak untuk pelayanan umum cenderung memiliki kinerja yang lebih rendah. Kapasitas teknis menjadi indikator yang signifikan dalam menjelaskan perbedaan ini. Pemerintah Daerah dengan kapasitas teknis yang lebih kuat dapat mengelola fiskalnya dengan lebih efektif.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bappenas dalam mengkoordinasikan kajian ini, dan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah memberikan arahan yang sangat berharga sepanjang kajian ini. Prospera berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas belanja publik.

David Nellor

Director, Prospera

Ringkasan Eksekutif

- **Transfer ke daerah (TKD) merupakan instrumen fiskal penting yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat untuk mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, khususnya yang berada di bawah wewenang Pemerintah Daerah.** Hal ini mengingat sekitar sepertiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditransfer setiap tahunnya ke daerah melalui TKD untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik di daerah. Dalam satu dekade terakhir, besaran TKD meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar 411 triliun rupiah di tahun 2011 menjadi 764 triliun rupiah di tahun 2020, di mana lebih dari setengahnya ditransfer ke daerah dalam bentuk dana transfer umum yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sebagian besar dari TKD dialokasikan untuk belanja yang berhubungan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan kesehatan. Di tahun 2022, TKD berkontribusi terhadap lebih dari setengah belanja terkait pelayanan dasar di sektor pendidikan dan perlindungan sosial (LKPP, 2022).
- **Namun, peningkatan dari TKD tidak disertai dengan percepatan dari perbaikan kondisi sosio-ekonomi secara signifikan.** Dalam 1 dekade terakhir, rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cenderung menurun, bahkan sebelum pandemi Covid-19 menghantam perekonomian Indonesia di tahun 2020. Di tahun 2011, rata-rata pertumbuhan PDRB tingkat provinsi dan kabupaten/kota berada di angka 6 persen, turun ke sekitar 5 persen di tahun 2019, sebelum jatuh ke -1 persen di tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Hasil yang sejalan juga terlihat pada pertumbuhan kondisi sosio-ekonomi yang dilambangkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam periode 2011 – 2019, peningkatan IPM berada di kisaran kurang 1 persen poin setiap tahunnya atau hanya bertumbuh sekitar 4,2 poin selama 9 tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis evaluasi dampak TKD terhadap kondisi sosio-ekonomi untuk merumuskan kebijakan terkait penguatan kualitas transfer.
- **Studi ini menggunakan analisis secara berjenjang untuk melihat dampak TKD dan belanja daerah secara keseluruhan terhadap kondisi sosio-ekonomi di daerah pada rentang waktu 2017 hingga 2021.** Evaluasi dampak harus dilakukan secara berjenjang karena keterbatasan dalam segmen akun pada pelaporan belanja daerah yang tidak mencantumkan sumber pendanaan dari setiap belanja, baik itu pendanaan yang berasal dari TKD atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada bagian pertama, evaluasi berfokus pada analisis dampak pengaruh transfer terhadap total belanja Pemerintah Daerah. Hasil ini diperlukan untuk mengetahui jenis transfer yang memiliki dampak terbesar dalam mendorong belanja Pemerintah Daerah. Pada bagian kedua, dilakukan evaluasi kinerja belanja terhadap capaian outcome dan output di masing-masing sektor. Pada bagian ini, analisis belanja difokuskan kepada evaluasi dampak belanja di tiga sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Terakhir, evaluasi difokuskan untuk melihat pengaruh dari belanja Pemerintah Daerah terhadap perekonomian di daerah. Analisis ini bertujuan untuk menghitung ‘efek pengganda (multiplier effect)’ dari setiap rupiah belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap perekonomian daerah.

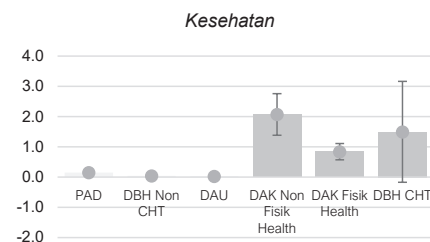
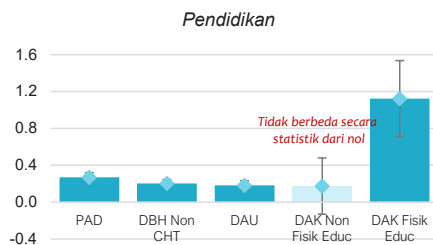
Ringkasan Eksekutif

Gambar 1 Hasil Regresi Dampak Penerimaan Pemerintah Daerah Berdasarkan Jenis Terhadap Total Belanja, Belanja Berdasarkan Jenis, dan Belanja Berdasarkan Fungsi, 2017-2021

1% kenaikan

Peningkatan Belanja Daerah Per Kapita (%)

	Total Belanja	Pegawai	Modal	Barang & Jasa
PAD per Kapita	0.84	0.09	0.18	0.25
DBH per Kapita	0.98	0.01	0.43	0.17
DAU per Kapita	1.07	0.36	0.11	0.71
DAK per Kapita	1.20	-0.17	1.30	1.11
TKDD lain per Kapita	0.98			



Pada bagian pertama yang berupaya untuk melihat channeling dari transfer dan sumber pembiayaan internal terhadap komposisi belanja, penelitian ini menemukan bahwa transfer yang bersifat khusus merupakan jenis transfer yang paling stimulatif terhadap besaran keseluruhan dari belanja Pemerintah Daerah. Temuan ini terlihat dari analisis dampak penerimaan daerah berdasarkan jenis penerimaan terhadap belanja Pemerintah Daerah berdasarkan total belanja, jenis belanja, dan jenis fungsi. Dalam analisis dampak kepada tiga variabel tersebut terlihat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK), yang merupakan jenis transfer khusus, memiliki efek stimulatif tertinggi terhadap total belanja Pemerintah Daerah bila dibandingkan dengan jenis penerimaan lainnya. Setiap peningkatan 1 rupiah pendapatan daerah dari DAK berkorelasi dengan peningkatan total belanja Pemerintah Daerah sebesar 1,20 rupiah. Selain itu, DAK menjadi sumber pendanaan yang paling sensitif dalam meningkatkan belanja modal dan belanja sektoral (pendidikan dan kesehatan) daerah.

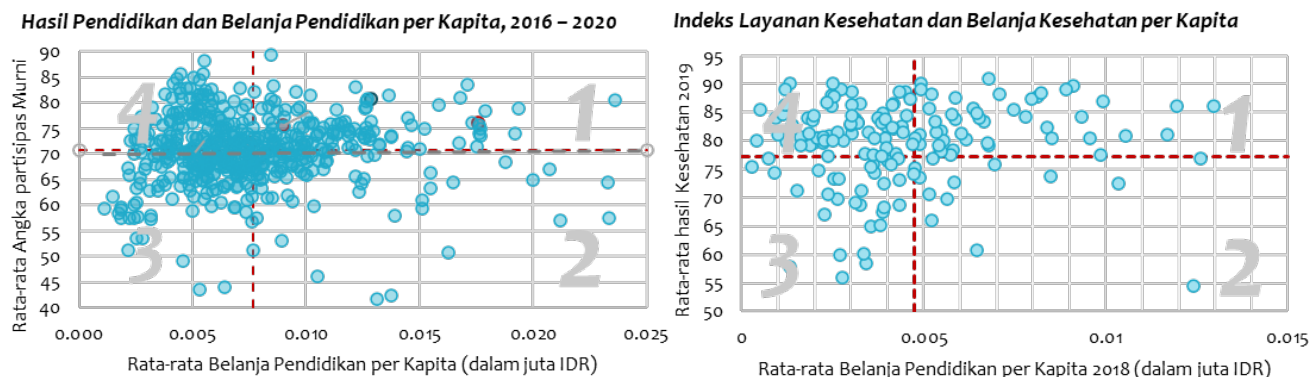
Ringkasan Eksekutif

- Di sisi lain, DAU yang merupakan jenis transfer bersifat umum dan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar operasional pemerintahan, belum memiliki dampak langsung terhadap besaran belanja sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Meskipun memiliki nilai koefisien lebih dari satu pada model total belanja, DAU hanya stimulatif terhadap jenis belanja yang bersifat operasional, yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Selain itu, DAU memiliki nilai koefisien yang paling rendah dalam fungsi pendidikan dan kesehatan, sehingga secara umum peningkatan DAU tidak secara signifikan mempengaruhi besaran nilai belanja pendidikan dan kesehatan daerah.
- Hasil analisis juga menunjukkan bahwa PAD belum memiliki dampak stimulatif yang sekuat TKD dalam mendorong belanja Pemerintah Daerah. PAD memiliki nilai koefisien dampak sebesar 0,84 terhadap belanja Pemerintah Daerah, dengan kata lain peningkatan 1 rupiah PAD hanya akan mendorong total belanja Pemerintah Daerah untuk naik sekitar 0,84 rupiah. Rendahnya nilai koefisien ini mengindikasikan tingkat pemanfaatan PAD yang masih rendah dan berpotensi menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk periode fiskal berikutnya.
- Temuan pada bagian pertama sejalan dan menguatkan langkah reformasi kebijakan TKD seperti yang juga telah diamanatkan pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pertama, di pasal 130, DAU ditransformasi menjadi transfer yang ditentukan penggunaannya, khususnya pada daerah-daerah dengan tingkat capaian kinerja layanan daerah tertentu. Transformasi ini diharapkan dapat mendorong efek stimulan dari DAU secara total belanja maupun sektoral. Kedua, mengubah realisasi PAD menjadi potensi PAD untuk menunjukkan kapasitas fiskal daerah. Perubahan ini berpotensi mengurangi nilai transfer yang diterima bila potensi PAD lebih besar dari nilai PAD yang diterima, sehingga daerah akan terdorong untuk lebih menggunakan PAD sebagai sumber pendanaan belanja. Namun, penguatan perlu dilakukan pada kebijakan jangka pendek, mengingat penerapan kebijakan hold harmless menyebabkan perubahan formula ini tidak akan efektif untuk dilaksanakan hingga tahun 2027.
- Pada bagian kedua, studi ini menemukan bahwa secara umum belanja Pemerintah Daerah belum secara signifikan mendorong peningkatan indikator sosio-ekonomi di daerah. Hasil ini terlihat pada analisis regresi belanja Pemerintah Daerah terhadap indikator capaian jangka panjang, menggunakan IPM, dan capaian jangka pendek yang dilambangkan oleh indikator capaian beberapa sektor terpilih. Pada analisis terhadap indikator capaian jangka panjang, terlihat bahwa dampak belanja Pemerintah Daerah tidak signifikan dalam meningkatkan IPM. Dampak positif dan signifikan baru ditemukan setelah melakukan analisis lebih mendalam kepada komponen pembentuk IPM. Pada tahap ini, belanja Pemerintah Daerah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan capaian ekonomi (pengeluaran rumah tangga per kapita), tetapi tidak signifikan dalam meningkatkan capaian kesehatan (angka harapan hidup) dan pendidikan (rata-rata lama sekolah). Hal ini utamanya dikarenakan peningkatan indikator kesehatan dan pendidikan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan indikator ekonomi.

Ringkasan Eksekutif

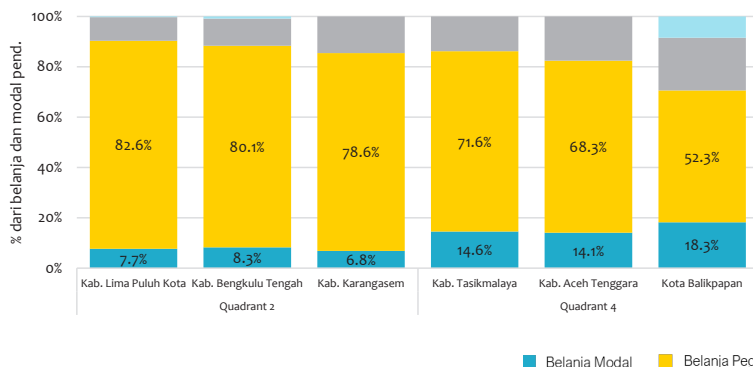
- Pada indikator capaian yang lebih bersifat jangka pendek, belanja Pemerintah Daerah terlihat memiliki dampak signifikan terhadap capaian *outcome* hanya untuk dua sektor terkait pelayanan dasar, yaitu sektor pendidikan dan air minum. Dari hasil regresi, ditemukan bahwa belanja pendidikan dan belanja infrastruktur memiliki dampak terhadap peningkatan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan akses rumah tangga kepada air bersih. Di sisi lain, belanja infrastruktur tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan akses jalan, akses rumah tangga terhadap sanitasi layak, dan rumah layak huni. Hasil serupa juga ditemukan pada sektor kesehatan, di mana belanja kesehatan Pemerintah Daerah tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kelahiran di fasilitas kesehatan, peningkatan kelahiran dibantu tenaga medis, dan penggunaan alat kontrasepsi yang merupakan tiga dari dua belas indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang wajib dipenuhi oleh daerah.
- Hasil ini disebabkan oleh pola alokasi belanja sektoral yang berfokus kepada pemenuhan jenis belanja terkait operasional dibandingkan dengan jenis belanja terkait infrastruktur. Mengingat mayoritas indikator SPM yang digunakan melambangkan akses, peningkatan capaian akan lebih terdorong melalui alokasi belanja infrastruktur yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan analisis kuadran pada sektor pendidikan dan kesehatan yang memperlihatkan Pemerintah Daerah di kuadran 4 dengan karakteristik belanja per kapita sektoral yang rendah tetapi memiliki capaian sektoral yang baik, memiliki proporsi belanja modal yang lebih besar dibandingkan dengan Pemerintah Daerah di kuadran 2 dengan karakteristik belanja per kapita sektoral yang tinggi tetapi memiliki capaian sektoral yang masih rendah.

Gambar 2 analisis Kuadran Capaian dan Rata-rata Tingkat Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Pendidikan (2017 – 2021) dan Kesehatan (2018 – 2019)

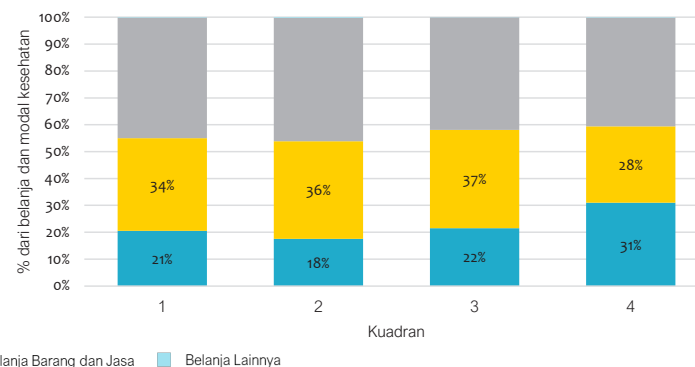


Ringkasan Eksekutif

Proporsi Belanja Fungsi Pendidikan Berdasarkan Jenis Belanja, 2017 – 2021



Proporsi Belanja Fungsi Kesehatan Berdasarkan Jenis Belanja, 2017 – 2021

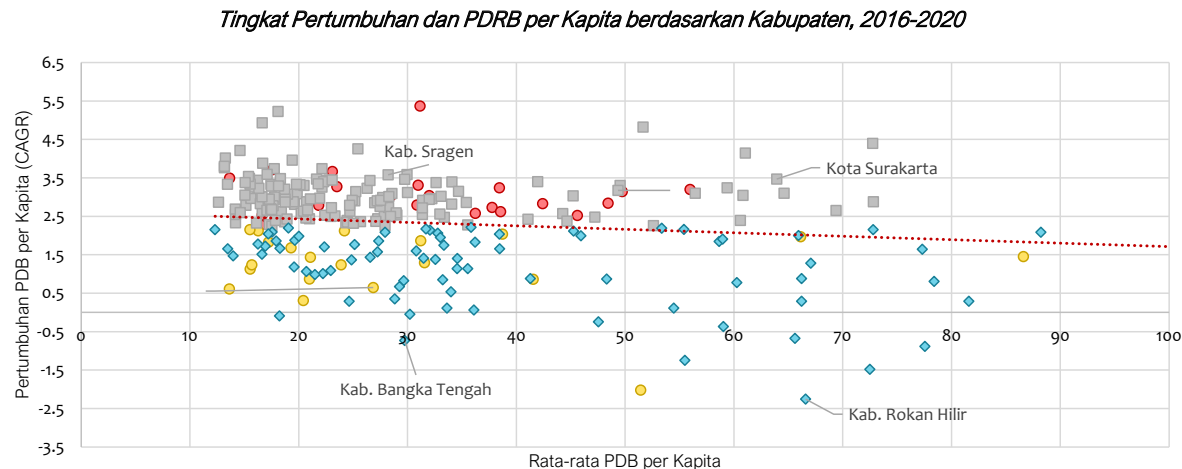


- Untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Daerah dalam peningkatan kondisi sosial-ekonomi diperlukan penguatan pengawasan dalam implementasi pengalokasian belanja wajib infrastruktur dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat-daerah.** Penguatan pengawasan diperlukan untuk memastikan peningkatan belanja wajib infrastruktur dari yang sebelumnya sebesar 25 persen Dana Transfer Umum (DTU) menjadi 40 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah bagi hasil dan transfer dialokasikan kepada infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan publik. Selain itu, belanja infrastruktur yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah perlu disinergikan dengan bantuan infrastruktur yang dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga.
- Terakhir, analisis terakhir memperlihatkan bahwa multiplier effect dari belanja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah berada pada tingkat moderat.** Hasil regresi yang dilakukan menunjukkan sekitar 1 rupiah belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah di tahun 2017 hingga 2020 meningkatkan sekitar 0,78 rupiah pertumbuhan PDRB pada periode yang sama. Angka ini terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan Tiongkok pada periode 2000 – 2009 yang memiliki nilai efek pengganda sebesar 0,6 dan setingkat dengan Jepang di periode 1990 – 2000. Namun, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Filipina pada periode 2009 – 2016 yang dapat mencapai nilai 0,8 hingga 1,2.

Ringkasan Eksekutif

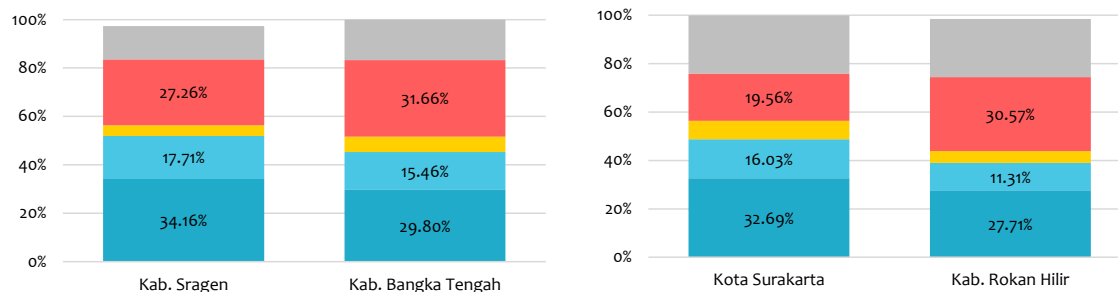
- **Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan mengalokasikan belanja yang lebih besar kepada fungsi-fungsi terkait pelayanan publik.** Hal ini dikarenakan adanya hubungan terbalik antara porsi belanja untuk fungsi terkait internal dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tingkat pendapatan yang sama, daerah dengan porsi belanja internal, yang dilambangkan oleh fungsi pelayanan umum, yang lebih besar cenderung memiliki capaian pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih rendah. Sebagai contoh, Kab. Bangka Tengah dan Kab. Rokan Hilir secara berturut-turut memiliki tingkat PDRB per kapita yang serupa dengan Kab. Sragen dan Kota Surakarta pada periode 2016 – 2020. Namun, Kab. Bangka Tengah dan Kab. Rokan Hilir secara konsisten memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Kondisi ini memiliki asosiasi dengan pola belanja kedua kabupaten ini yang memiliki porsi belanja untuk fungsi pelayanan umum yang lebih besar dibandingkan daerah pembandingnya. Kab. Bangka Tengah dan Kab. Rokan Hilir memiliki porsi belanja pelayanan umum sebesar 31,6 persen dan 30,57 persen secara berturut-turut. Porsi ini lebih besar dibandingkan dengan Kab. Sragen dan Kota Surakarta yang memiliki porsi belanja pelayanan umum sebesar 27,3 persen dan 19,6 persen.

Gambar 3 Hubungan Antara Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Pola Belanja, 2016 – 2020



Ringkasan Eksekutif

Total Belanja per Kapita berdasarkan Fungsi Belanja – Kabupaten, 2016 – 2020



- **Kapasitas teknis memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan kapasitas fiskal, terlihat bahwa daerah yang memiliki kapasitas teknis yang rendah cenderung memiliki porsi fungsi pelayanan umum yang lebih besar terlihat memiliki meskipun memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik.** Nilai kapasitas teknis ini dihitung menggunakan skor Evaluasi Kinerja Anggaran DAK Fisik (EKA DAK Fisik). Skor EKA DAK Fisik merupakan instrumen yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk melihat tingkat kapasitas teknis Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAK Fisik yang terdiri dari empat indikator utama, yaitu realisasi anggaran, realisasi output, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan nilai efisiensi. Dengan menggunakan indikator ini, terlihat adanya hubungan terbalik antara porsi belanja fungsi pelayanan umum dengan nilai EKA DAK Fisik yang lebih rendah.
- **Untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat melakukan intervensi yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong kapasitas teknis Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja.** Metode langsung dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kualitas belanja oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait. Hal ini untuk memastikan kualitas belanja Pemerintah Daerah tetap terjaga dan bermanfaat langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, intervensi tidak langsung dapat dilakukan melalui pembatasan ataupun penyusunan daftar negatif (negative list) kepada output yang bertujuan untuk internal. Secara teknis, daftar negatif ini dapat dimasukkan dalam aturan terkait petunjuk teknis penyusunan APBD.



Kementerian PPN/
Bappenas



PROSPERA

Program Kemitraan Indonesia
Australia untuk Perekonomian

Rangkuman Rekomendasi Kebijakan



Sejalan dengan amanat dari UU No.1 Tahun 2022, arah kebijakan TKD dapat diarahkan untuk penggunaan yang ditentukan (*earmarked*), terutama untuk daerah yang masih menghadapi kendala pemenuhan layanan publik.

Temuan dari studi ini menguatkan relevansi dari amanat pada Pasal 130 UU No.1 Tahun 2022 mengenai transformasi DAU menjadi transfer yang ditentukan penggunaannya, khususnya untuk daerah-daerah yang menghadapi kendala kinerja pelayanan publik. Transformasi ini diharapkan dapat mendorong penggunaan DAU untuk belanja yang berkaitan dengan pemenuhan SPM.

Temuan lain dari studi ini juga sejalan dengan amanat dari UU No.1 Tahun 2022 untuk menjadikan potensi PAD sebagai bagian dari formula kapasitas fiskal untuk mendorong daerah untuk memaksimalkan penggunaan PAD untuk belanja daerah. Meskipun hal ini sudah menjadi arah kebijakan jangka panjang, langkah cepat tetap dibutuhkan sebagai *stop-gap* karena ketentuan ini baru akan diimplementasikan pada 2027 (periode *hold harmless*).



Membangun sistem pemantauan terhadap pemenuhan belanja wajib Pemerintah Daerah yang memerhatikan keselarasan dengan prioritas dan arah kebijakan Pemerintah Pusat.

UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan kenaikan belanja wajib infrastruktur dari sebelumnya 25% DTU (berdasarkan UU APBN Tahun 2017) menjadi 40% dari total anggaran daerah (setelah dikurangi bagi hasil dan transfer ke daerah di bawahnya). Peningkatan ini perlu disertai dengan penguatan pemantauan guna memastikan belanja infrastruktur digunakan untuk penyediaan layanan dasar.

Selain dari aspek kecukupan belanja wajib, hal lain yang harus menjadi prioritas adalah penyesuaian kebijakan belanja daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat/prioritas nasional untuk meningkatkan dampak total belanja daerah terhadap capaian sosial-ekonomi



Kualitas belanja daerah harus ditingkatkan, dengan mendorong komposisi belanja untuk fungsi-fungsi terkait pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Membangun kapasitas teknis di tingkat Pemerintah Daerah, terutama dalam aspek perencanaan dan penganggaran sehingga dapat mendorong kualitas anggaran belanja yang lebih baik. Peran yang dapat diambil oleh Pemerintah Pusat adalah dengan memberikan panduan/bimbingan teknis supaya Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi pos-pos belanja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Selain itu, dibutuhkan penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada Pemerintah Daerah guna memastikan efektivitas belanja terhadap perekonomian daerah.



Kementerian PPN/
Bappenas



PROSPERA

Program Kemitraan Indonesia
Australia untuk Perekonomian

Analisis Kebijakan Makro-Fiskal: **Kualitas Belanja Transfer ke Daerah**

Latar Belakang dan Tujuan Kajian



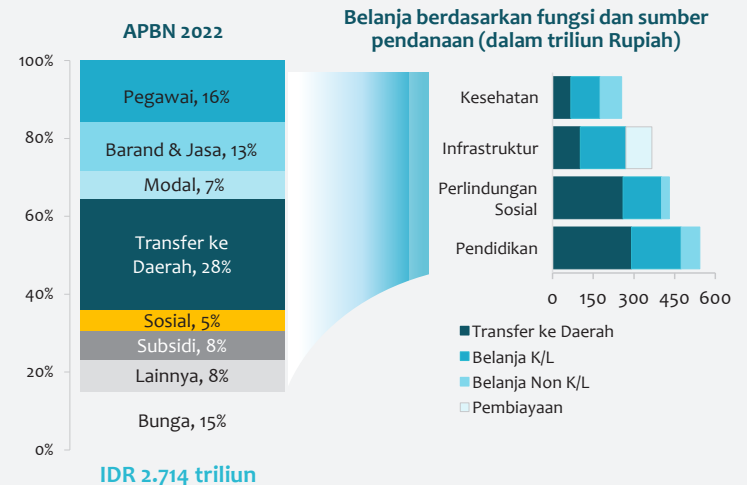
Transfer ke daerah (TKD), yang menghabiskan hampir sepertiga dari APBN, berperan penting dalam pelayanan publik di bidang-bidang pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur). Perbaikan kebijakan TKD dapat meningkatkan pelaksanaan layanan publik di bidang-bidang tersebut.

Tujuan



- 1 sebagai asesmen terhadap efektivitas belanja TKD dalam mendorong komposisi belanja berkualitas
- 2 mengkaji dampak agregat dari belanja daerah terhadap perekonomian daerah (*local fiscal multiplier*) untuk memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan transfer ke daerah yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan penguatan kualitas transfer

Belanja TKD memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar...



Oleh karena itu, peningkatan kualitas TKD dapat mengakselerasi pelayanan publik. Namun, hal ini membutuhkan kerangka evaluasi yang baik.

Kajian ini menyajikan evaluasi untuk meningkatkan kualitas TKD..

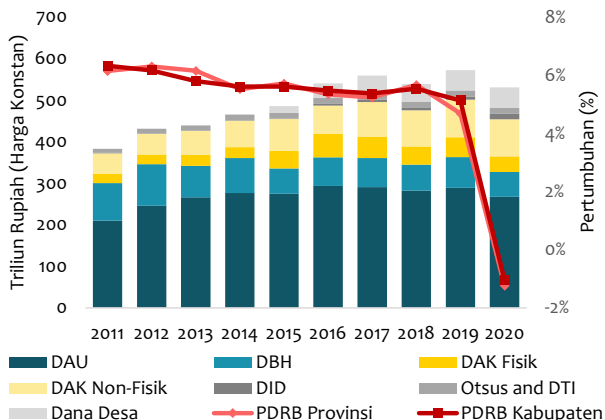
Gambaran Umum

Peningkatan TKD tidak disertai dengan percepatan perbaikan indikator sosial ekonomi

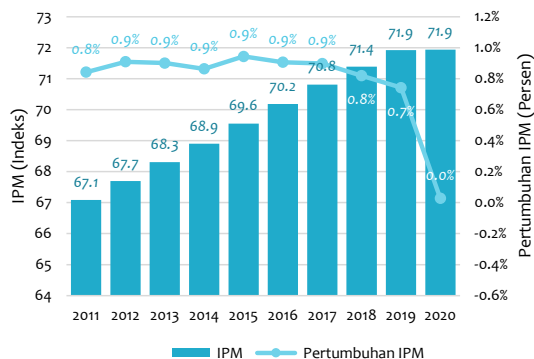
Transfer ke daerah meningkat secara signifikan selama satu dekade terakhir. Namun, tidak disertai percepatan perbaikan kondisi sosial-ekonomi daerah. . .

- Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi dan Kabupaten. Tren serupa ditemukan pada indikator sosial ekonomi, seperti IPM.
- Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dari pelaksanaan TKD selama ini terhadap capaian kondisi sosial-ekonomi daerah

Tren Dana Transfer Daerah Harga Konstan dan Pertumbuhan PDRB, 2011 – 2020



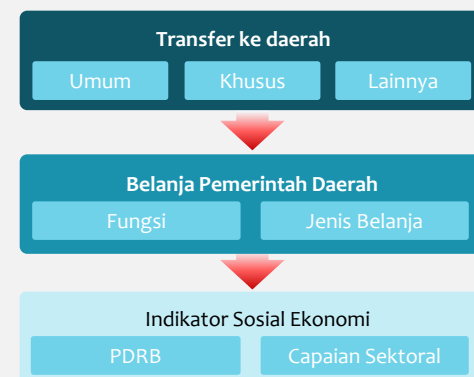
Tren IPM dan Pertumbuhan IPM, 2011 – 2020



Sumber: Kemenkeu, BPS - Analisis Prospera

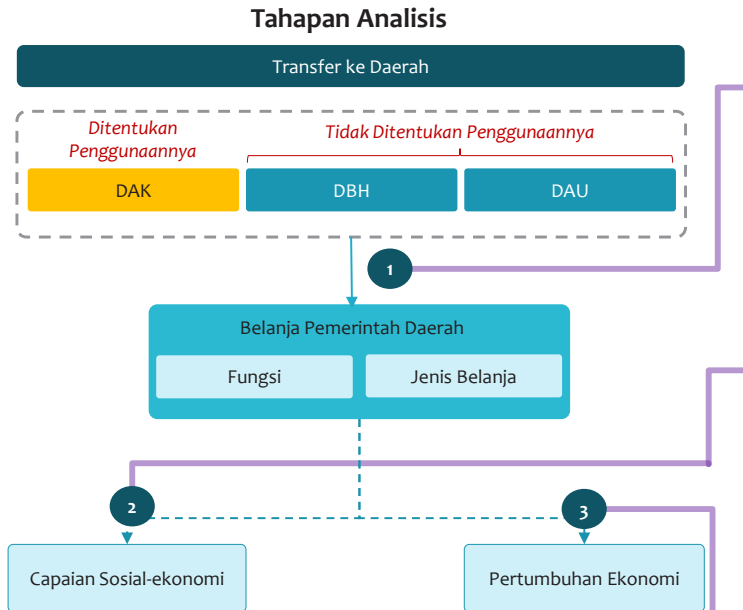
Menilai efektivitas TKD

- Mengingat pola pertumbuhan yang tidak sejalan antara TKD dan indikator sosial ekonomi, maka evaluasi dampak TKD menjadi hal penting yang perlu dilakukan.
- Mengingat TKD tidak memiliki pengaruh yang langsung terhadap indikator sosial ekonomi, maka evaluasi TKD dilakukan secara bertahap dengan melihat dampaknya terlebih dahulu terhadap belanja daerah.



Analisis Dampak Transfer Terhadap Indikator Sosial Ekonomi

Kerangka Analisis dan Hasil Kajian



Ringkasan Hasil Kajian

1 Dampak TKD Terhadap Komposisi Belanja

- DAU cenderung digunakan untuk belanja pegawai dan barang & jasa, sementara PAD cenderung hanya dibelanjakan untuk barang & jasa.
- Jenis transfer yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap jenis belanja sektoral (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur).
- PAD memiliki dampak yang paling rendah terhadap pola belanja, mengindikasikan tingkat pemanfaatan yang belum optimal.

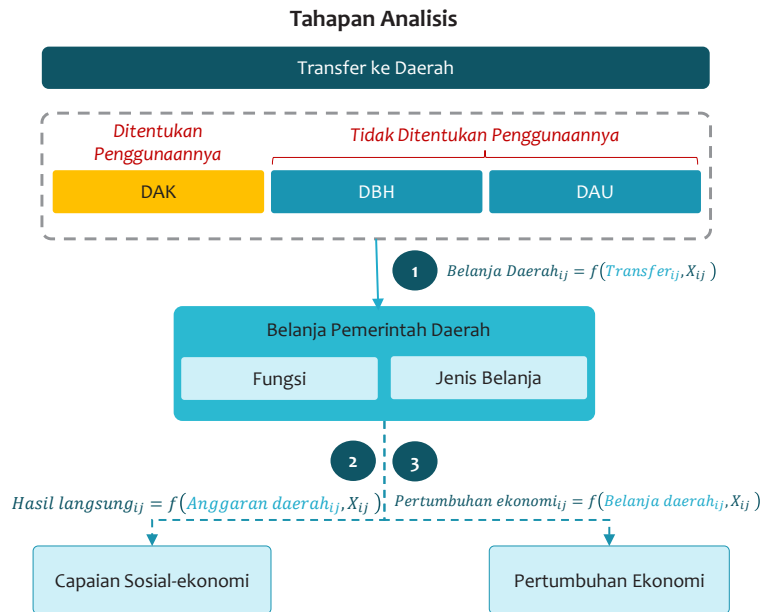
2 Dampak TKD Terhadap Efektivitas Belanja Sektoral

- Belanja daerah tidak mempunyai dampak signifikan terhadap capaian sosial-ekonomi agregat seperti IPM karena terdapat sub-indikator IPM yang memerlukan intervensi jangka menengah-panjang, seperti pilar kesehatan dan pendidikan.
- Belanja sektor pendidikan dan belanja infrastruktur dasar secara berturut-turut signifikan memengaruhi capaian pendidikan dan capaian pemenuhan air minum layak.
- Proporsi belanja modal yang lebih besar berasosiasi dengan capaian kondisi sosio-ekonomi yang lebih baik.

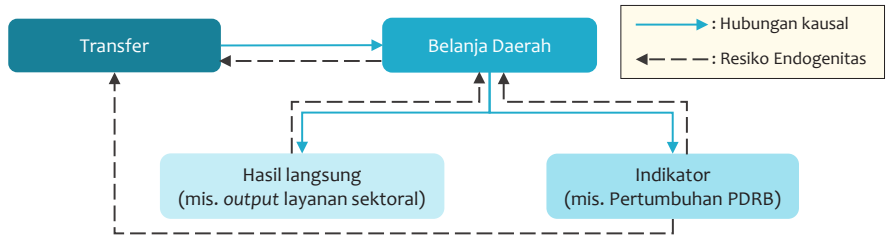
3 Dampak TKD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

- *Fiscal Multiplier* belanja Pemerintah Daerah di Indonesia diperkirakan sebesar 0,78 (berada pada tingkat moderat).
- Pemerintah daerah dengan porsi belanja Pelayanan Umum lebih rendah memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
- Kualitas belanja APBD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Metodologi dan Pemilihan Model



Meski demikian, dalam memperkirakan dampak, terdapat permasalahan endogenitas yang dapat menghasilkan bias dalam estimasi



Beberapa contoh isu endogenitas:

- Pengeluaran pemerintah daerah dalam satu periode dapat mempengaruhi perhitungan **DAU** pada periode berikutnya, karena formula kebutuhan fiskal memasukan variabel PDRB yang dipengaruhi oleh belanja daerah.
- Faktor eksternal mempengaruhi capaian **output layanan** juga dapat memengaruhi belanja pemerintah daerah (mis., bencana alam atau lonjakan kebutuhan khusus)

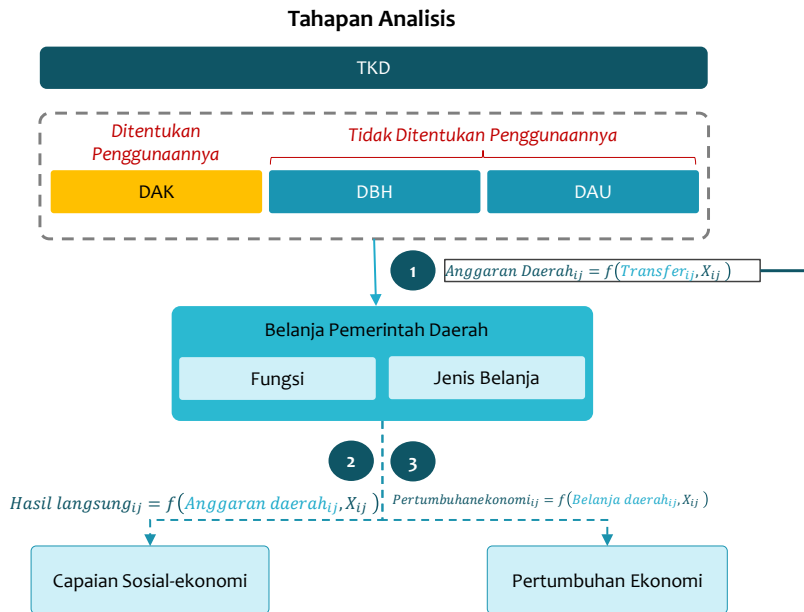
Dynamic Panel Data (Generalized Method of Moment): Metode Estimasi Pilihan

Isu	Fixed Effect IV 2SLS	Structural Equation Model	Dynamic Panel Data
Endogenitas	Mengatasi endogenitas namun dengan instrumen yang rentan terhadap kontestasi	Mengatasi endogenitas dengan cara menentukan hubungan kausal	Atasi endogenitas dengan menggunakan <i>time lag</i>
Selection bias	Mengatasi bias yang disebabkan oleh <i>omitted variables</i> melalui <i>fixed effect</i> unit dan waktu	Rentan terhadap <i>selection bias</i> karena sistem persamaan yang terbatas	Mengatasi bias yang disebabkan oleh variabel yang dihilangkan melalui <i>fixed effect</i> unit dan waktu

More Favorable

Metodologi dan Pemilihan Model

Detail Persamaan Model (1/3)



X_{it} : Kendali eksogen yang mencakup log populasi, angka kemiskinan, akses rumah tangga ke listrik, pemenuhan belanja wajib, dan log PDRB per kapita, dan produksi tembakau (untuk belanja kesehatan).
 θ_i : Efek tetap daerah
 ϑ_t : Efek tetap tahunan
 ε_{it} : Error term

Persamaan untuk Analisis 1

Total Belanja:

$$\begin{aligned} & \text{Log Total Belanja per Kapita}_{it} \\ &= \alpha + \beta_1 \text{Log PAD per Capita}_{it} + \beta_2 \text{Log DBH per Capita}_{it} + \beta_3 \text{Log DAU per Capita}_{it} \\ &+ \beta_4 \text{Log DAK per Capita}_{it} + \beta_5 \text{Log Other TKDD per Capita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Menurut jenis belanja:

$$\begin{aligned} & \text{Log Belanja Pegawai per Kapita}_{it} \\ &= \alpha + \beta_1 \text{Log PAD per Capita}_{it} + \beta_2 \text{Log DBH per Capita}_{it} + \beta_3 \text{Log DAU per Capita}_{it} \\ &+ \beta_4 \text{Log DAK per Capita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Log Belanja Modal per Kapita}_{it} \\ &= \alpha + \beta_1 \text{Log PAD per Capita}_{it} + \beta_2 \text{Log DBH per Capita}_{it} + \beta_3 \text{Log DAU per Capita}_{it} \\ &+ \beta_4 \text{Log DAK per Capita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Log Belanja Barang dan Jasa per Kapita}_{it} \\ &= \alpha + \beta_1 \text{Log PAD per Capita}_{it} + \beta_2 \text{Log DBH per Capita}_{it} + \beta_3 \text{Log DAU per Capita}_{it} \\ &+ \beta_4 \text{Log DAK per Capita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Menurut fungsi belanja :

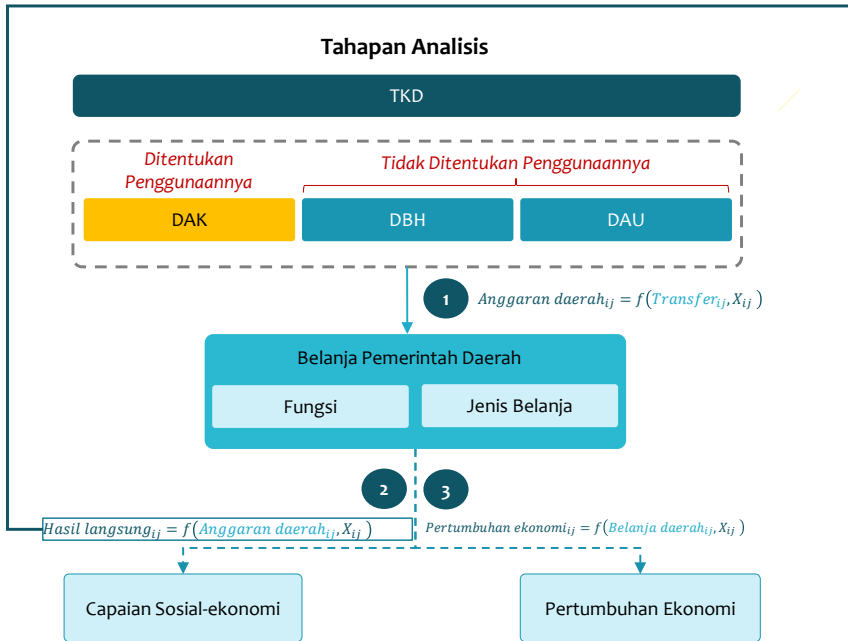
$$\begin{aligned} & \text{Log Belanja Pendidikan per Kapita}_{it} \\ &= \alpha + \beta_1 \text{Log PAD per Capita}_{it} + \beta_2 \text{Log DBH Non CHT per Capita}_{it} + \beta_3 \text{Log DAU per Capita}_{it} \\ &+ \beta_4 \text{Log DAK Pendidikan Non Fisik per Capita}_{it} + \beta_5 \text{Log DAK Pendidikan Fisik per Capita}_{it} + X_{it} + \theta_i \\ &+ \vartheta_t + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Log Belanja Kesehatan per Kapita}_{it} \\ &= \alpha + \beta_1 \text{Log PAD per Capita}_{it} + \beta_2 \text{Log DBH Non CHT per Capita}_{it} + \beta_3 \text{Log DAU per Capita}_{it} \\ &+ \beta_4 \text{Log DAK Kesehatan Non Fisik per Capita}_{it} + \beta_5 \text{Log DAK Kesehatan Fisik per Capita}_{it} \\ &+ \beta_6 \text{Log DBH CHT per Capita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Log Belanja Modal per Kapita}_{it} \\ &= \alpha + \beta_1 \text{Log PAD per Capita}_{it} + \beta_2 \text{Log DAU per Capita}_{it} + \beta_3 \text{Log DBH per Capita}_{it} \\ &+ \beta_4 \text{Log DAK per Capita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Metodologi dan Pemilihan Model

Detail Persamaan Model (2/3)



X_{it} : Kendali eksogen yang mencakup log populasi, angka kemiskinan, akses rumah tangga ke listrik, pemenuhan belanja wajib, variabel dependen selang waktu, dan log PDRB per kapita.
 θ_i : Efek tetap daerah
 ϑ_t : Efek tetap tahunan
 ε_{it} : Error term

Persamaan untuk Analisis 2

Hasil:

$$Indeks Pembangunan Manusia_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log Total Belanja per Kapita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan komponen dari Indeks Pembangunan Manusia:

$$\text{Harapan Hidup}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log Total Belanja per Kapita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it}$$

$$\text{Rerata Partisipasi Sekolah}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log Total Belanja per Kapita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it}$$

$$\text{Belanja RT Tahunan per Kapita}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log Total Belanja per Kapita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it}$$

Output:

Pendidikan:

$$\text{Angka Partisipasi Murni}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log Belanja Pendidikan per Kapita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it}$$

Kesehatan:

$$\text{Tingkat Kelahiran di Fasilitas Kesehatan}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log Belanja Kesehatan per Capita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it}$$

$$\text{Tingkat Kelahiran dibantu oleh Nakes Profesional}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log Health Spending per Capita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it}$$

$$\text{Tingkat Penggunaan Alat Kontrasepsi}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log Health Spending per Capita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it}$$

Infrastruktur:

$$\text{Persentase Sanitasi yang Layak}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log Belanja Infrastruktur per Capita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it}$$

$$\text{Persentase Air Minum Layak}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log Belanja Infrastruktur per Capita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it}$$

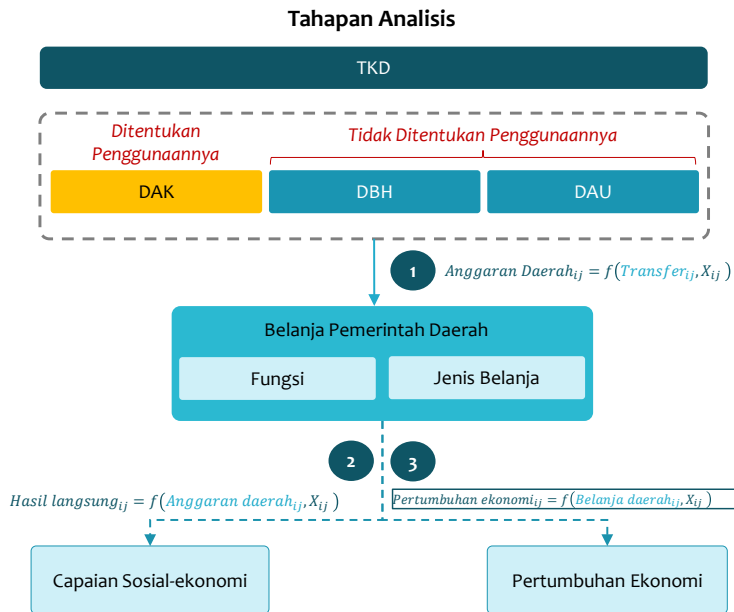
$$\text{Persentase jalan yang bagus}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log Belanja Infrastruktur per Capita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it}$$

$$\text{Panjang jalan per Area}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log Belanja Infrastruktur per Capita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it}$$

$$\text{Persentase Rumah Layak Huni}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log Belanja Infrastruktur per Capita}_{it} + X_{it} + \theta_i + \vartheta_t + \varepsilon_{it}$$

Metodologi dan Pemilihan Model

Detail Persamaan Model (3/3)



Persamaan untuk Analisis 3

Hasil Ekonomi Makro:

$$Pertumbuhan Ekonomi Daerah_{it} = \alpha + \beta_1 Pertumbuhan Total Belanja_{it} + X_{it} + \theta_t + \vartheta_t + \varepsilon_{it}$$

X_{it} : Kendali eksogen yang mencakup angka pertumbuhan populasi, tingkat pertumbuhan pendapatan pajak daerah, persentase rumah tangga dengan akses ke listrik, contoh untuk guncangan dalam pertumbuhan ekonomi
 θ_t : Efek tetap daerah
 ϑ_t : Efek tetap tahunan
 ε_{it} : Error term



Kementerian PPN/
Bappenas



PROSPERA

Program Kemitraan Indonesia
Australia untuk Perekonomian

1

Dampak TKD Terhadap Komposisi Belanja

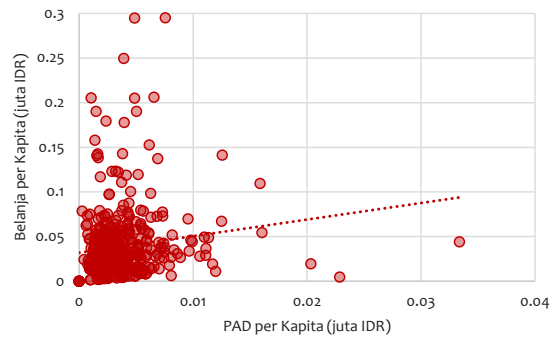
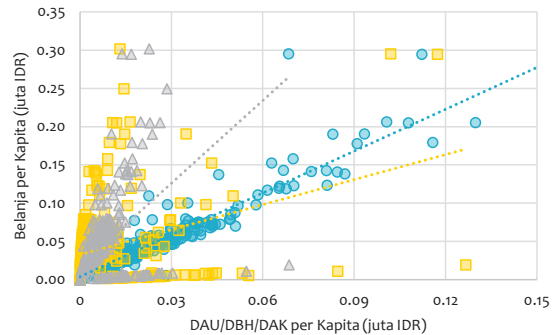
Estimasi efek fly-paper*

*Flypaper effect adalah konsep keuangan publik yang menunjukkan bahwa tingginya transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah menyebabkan peningkatan belanja daerah yang lebih tinggi dibanding peningkatan pendapatan daerah.

Analisis Dampak TKD Terhadap Belanja (1/2)

Hasil estimasi dampak TKD terhadap total belanja

Rata-Rata TKD, PAD dan Pertumbuhan Belanja per Kapita, 2017 – 2021



● DAU ■ DBH ▲ DAK ● PAD
..... Linear (DAU) Linear (DBH) Linear (DAK) Linear (PAD)

DAK adalah jenis TKD yang memberikan dampak terbesar terhadap pertumbuhan total belanja daerah

- Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan DAK membutuhkan dana pendamping (*matching grant*), terutama untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga Pemerintah Daerah mengeluarkan belanja yang lebih besar.
- Di sisi lain, PAD memiliki tingkat pemanfaatan yang belum optimal. Kondisi ini dapat mendorong peningkatan SILPA karena pendapatan tidak secara optimal dimanfaatkan.
- Jenis TKD *non-earmarked* seperti DAU dan DBH memiliki dampak yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis TKD *earmarked*.

Dampak dari TKD Per Kapita dan PAD terhadap Belanja Per Kapita, 2017 – 2021

Variabel Dependen: Log Total Belanja per Kapita	
Log PAD per Kapita	0.844*** (0.221)
Log DBH per Kapita	0.981*** (0.213)
Log DAU per Kapita	1.074*** (0.080)
Log DAK per Kapita	1.196*** (0.320)
Log TKDD lain per Kapita	0.987*** (0.330)
Variabel Kontrol	Yes
District Fixed Effect	Yes
Time Fixed Effect	Yes
# dari IV	30
Nilai Hansen P_	0.40
Nilai AR(2) P_	0.10
# dari daerah	542
# dari observasi	2,198

* Variabel kontrol mencakup log populasi, angka kemiskinan, akses RT ke listrik, dan log GRDP per kapita.

** Seluruh hitungan fiskal ada dalam jangka konstan 2010.

Elastisitas Jenis TKD Per Kapita Terhadap Belanja Daerah, Per Kapita 2017 – 2021

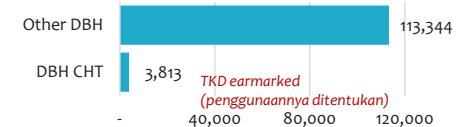
1%

kenaikan

Meningkatkan Belanja per Kapita (%)

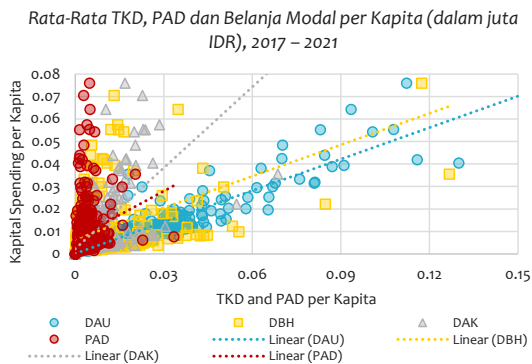
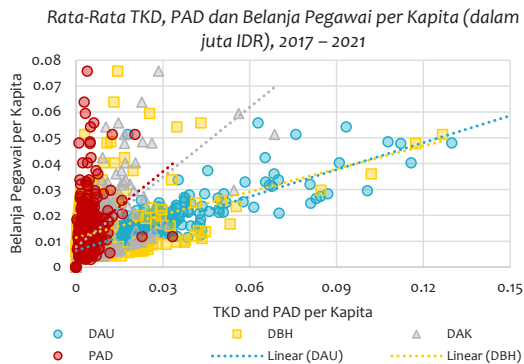
PAD per Kapita	0.84
DBH per Kapita	0.98
DAU per Kapita	1.07
DAK per Kapita	1.20
TKDD lain per Kapita	0.98

Realisasi DBH menurut Jenis tahun 2021 (dalam Miliar)

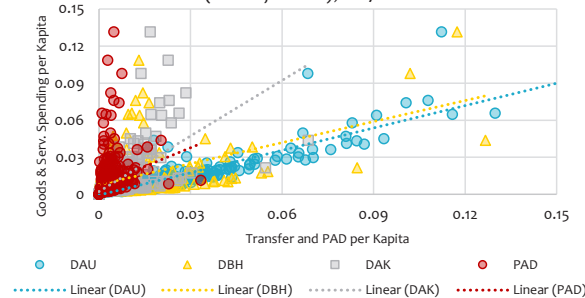


Analisis Dampak TKD Terhadap Belanja(2/2)

Hasil estimasi dampak TKD terhadap belanja berdasarkan jenis



Rata-Rata TKD, PAD dan Belanja Barang & Jasa per Kapita (dalam juta IDR), 2017 – 2021



Dampak TKD Per Kapita dan PAD pada Belanja Per Kapita, 2017 – 2021

	Log Belanja per Kapita berdasarkan Jenis:		
	Pegawai	Modal	Barang & Jasa
Log PAD per Kapita	0.095 (0.127)	0.184 (0.214)	0.245* (0.147)
Log DBH per Kapita	0.013 (0.098)	0.425*** (0.123)	0.169* (0.095)
Log DAU per Kapita	0.363*** (0.053)	0.106 (0.092)	0.711*** (0.221)
Log DAK per Kapita	-0.165 (0.196)	1.298*** (0.392)	1.107 (0.677)
Variabel Kontrol	Ya	Ya	Ya
District Fixed Effect	Ya	Ya	Ya
Time Fixed Effect	Ya	Ya	Ya
# dari IV	26	30	21
Nilai Hansen P_	0.10	0.31	0.66
Nilai AR(2) P_	0.80	0.29	0.10
# dari daerah	542	542	541
# dari observasi	2,198	2,198	1,656

* Variabel kontrol mencakup log populasi, angka kemiskinan, akses RT ke listrik, pemenuhan belanja wajib, dan log GRDP per kapita.

** Seluruh hitungan fiskal ada dalam jangka konstan 2010.

TKD non-earmarked cenderung memberikan dorongan yang lebih besar pada jenis belanja operasional

- TKD non-earmarked, seperti DAU dan DBH, cenderung digunakan untuk belanja yang terkait dengan operasional: belanja pegawai dan barang & jasa.
- DAK, sebagai TKD earmarked, lebih mendorong peningkatan belanja modal.
- Di sisi lain, PAD lebih mendorong peningkatan belanja barang & jasa.

1%

kenaikan per Kapita

Belanja per Kapita lebih tinggi (%)

	Pegawai	Modal	Barang & Jasa
PAD	0.09	0.18	0.25
DBH	0.01	0.43	0.17
DAU	0.36	0.11	0.71
DAK	-0.17	1.30	1.11

Analisis Dampak TKD Terhadap Belanja Sektoral:

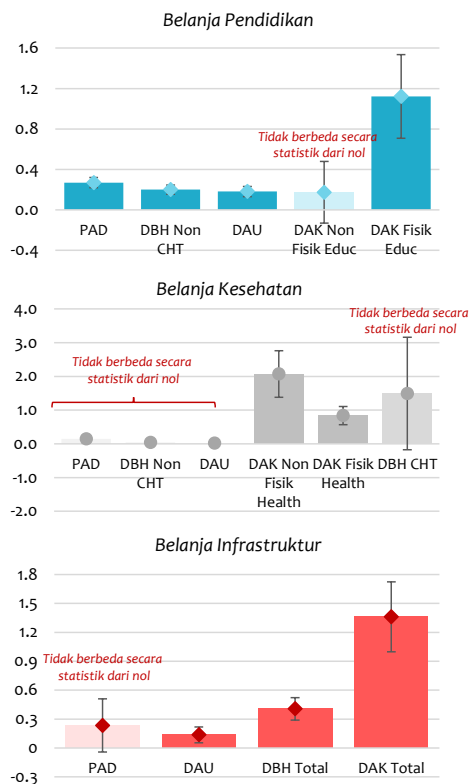
TKD *earmarked* memiliki dampak yang lebih besar terhadap belanja sektoral

Dampak TKD Per Kapita dan PAD pada Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Modal per Kapita, 2017 – 2020

	Log Belanja Per Kapita menurut Fungsi:		
	Pendidikan	Kesehatan	Modal (Proksi Alternatif)
Log PAD per Kapita	0.270*** (0.050)	0.145 (0.118)	0.234 (0.277)
Log DBH Non CHT per Kapita	0.201*** (0.046)	0.040 (0.050)	
Log DAU per Kapita	0.182*** (0.050)	0.020 (0.041)	0.137* (0.082)
Log DAK Non Fisik Pend per Kapita	0.174 (0.305)		
Log DAK Fisik Pend per Kapita	1.122*** (0.413)		
Log DAK Non Fisik Kesehatan per Kapita		2.073*** (0.689)	
Log DAK Fisik Kesehatan per Kapita		0.839*** (0.269)	
Log DBH CHT per Kapita		1.492 (1.669)	
Log DBH Total per Kapita			0.406*** (0.117)
Log DAK Total per Kapita			1.362*** (0.363)
Variabel Kontrol	Ya	Ya	Ya
District Fixed Effect	Ya	Ya	Ya
Time Fixed Effect	Ya	Ya	Ya
# dari IV	28	31	24
Nilai Hansen P	0.18	0.10	0.10
Nilai AR(2) P	0.77	0.71	0.46
# dari daerah	434	434	542
# dari observasi	1,484	1,484	2,165

* Variabel kontrol mencakup log populasi, angka kemiskinan, akses RT ke listrik, pemenuhan belanja wajib, dan log GRDP per kapita, dan produksi tembakau (untuk belanja kesehatan)

** Seluruh hitungan fiskal ada dalam jangka konstan 2010.



Secara umum, TKD *earmarked* lebih mendorong peningkatan belanja sektoral

- DAK merupakan jenis transfer yang paling mendorong belanja pada setiap sektor.
- DAK Fisik memiliki dampak terbesar pada belanja sektor pendidikan dan infrastruktur.
- DAK Non Fisik memiliki dampak yang lebih dominan terhadap belanja kesehatan. DAK non-Fisik tidak berdampak signifikan terhadap belanja pendidikan, diduga karena formula DAK non-Fisik Pendidikan yang didalamnya **ditentukan oleh jumlah penduduk** (misalnya BOS dan BOP PAUD), sehingga **nilai per kapitanya relatif konstan** dari waktu ke waktu.



Rekomendasi Kebijakan

Meningkatkan kualitas pemanfaatan TKD

TENGAH BERJALAN
(Memperkuat aturan yang ada)

Saat ini, terdapat kebijakan DAU *earmarked* berdasarkan UU No. 1/2022 (pasal 130) yang berpotensi meningkatkan dampak DAU terhadap belanja daerah, terutama pada sektor-sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, **Pemerintah Daerah perlu memastikan peningkatan jumlah DAU *earmarked* dimanfaatkan untuk komponen belanja yang berkualitas.**

Memanfaatkan PAD untuk mendorong belanja daerah yang produktif

SEKARANG
(Kebijakan baru yang perlu disusun segera)

UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (pasal 125 UU no. 1/2022) mengamanatkan perubahan formula DAU dari yang sebelumnya menggunakan realisasi PAD menjadi potensi PAD. Perubahan ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan PAD untuk belanja yang lebih produktif. Namun, mengingat aturan ini baru efektif berlaku di tahun 2027, dibutuhkan kebijakan jangka pendek yang dapat mendorong pemanfaatan PAD.

KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KEMENTERIAN LAINNYA
+		+	+
+	+	+	



Kementerian PPN/
Bappenas



PROSPERA

Program Kemitraan Indonesia
Australia untuk Perekonomian

2

Dampak TKD Terhadap Efektivitas Belanja Sektoral

Analisis Dampak Belanja Daerah Terhadap Capaian Sektoral

Analisis Efektivitas Belanja Daerah Terhadap IPM

Belanja Pemerintah Daerah tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap IPM

Peningkatan belanja per kapita daerah tidak signifikan dalam meningkatkan IPM

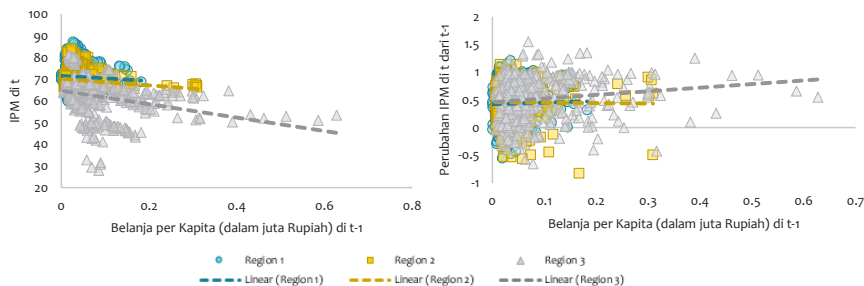
Estimasi Belanja Pemerintah Daerah pada IPM, 2017 – 2021

	Indeks Pembangunan Manusia			
	Semua Daerah	Regional 1	Regional 2	Regional 3
Log Belanja per Kapita	3.09 (5.165)	0.63 (2.781)	0.74 (4.125)	1.87 (2.194)
Variabel kontrol (log populasi, angka kemiskinan, akses RT ke listrik, dan log GRDP per kapita)	Ya	Ya	Ya	Ya
District fixed effect	Ya	Ya	Ya	Ya
Time fixed effect	Ya	Ya	Ya	Ya
# dari IV	17	17	17	14
Nilai Hansen P_	0.74	0.1	0.1	0.95
Nilai AR(2) P_	0.54	0.1	0.1	0.76
# dari daerah	508	276	147	85
# dari observasi	2,029	1,104	585	255

** Seluruh hitungan fiskal ada dalam jangka konstan 2010.

Daerah dengan IPM rendah cenderung memiliki belanja yang lebih besar, tetapi hasil yang didapatkan cenderung rendah...

Belanja per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2017 – 2021



Belanja daerah tidak berdampak signifikan terhadap capaian sosial-ekonomi agregat seperti IPM karena terdapat sub-indikator IPM yang memerlukan intervensi jangka menengah-panjang

- Secara langsung, belanja daerah memiliki dampak positif terhadap belanja rumah tangga (standar hidup) dikarenakan dampak indikator belanja rumah tangga kapita dapat terlihat di jangka pendek.
- Dampak belanja daerah pada indikator pendidikan dan kesehatan tidak berdampak secara langsung karena rata-rata partisipasi sekolah dan angka harapan hidup membutuhkan waktu yang lebih lama dalam merespon perubahan kebijakan belanja daerah.

Estimasi Belanja Pemerintah Daerah untuk Komponen IPM, 2017 – 2021

	Komponen Indeks Pembangunan Manusia		
	Harapan Hidup	Rata-rata Partisipasi Sekolah	Belanja Rumah Tangga Tahunan per Kapita (dalam log)
Log Belanja per Kapita	1.23 (1.670)	0.421 (0.943)	0.933** (0.38)
Variabel kontrol	Ya	Ya	Ya
District fixed effect	Ya	Ya	Ya
Time fixed effect	Ya	Ya	Ya
# dari IV	14	17	17
Nilai Hansen P_	0.74	0.1	0.1
Nilai AR(2) P_	0.54	0.96	0.20
# dari daerah	508	508	508
# dari observasi	1,521	2,029	2,029

* Variabel kontrol mencakup log populasi, angka kemiskinan, akses RT ke listrik, pemenuhan belanja wajib, dan log GRDP per kapita

** Seluruh hitungan fiskal ada dalam jangka konstan 2010.

1% Kenaikan belanja per Kapita
0.93% kenaikan dalam belanja RT per Kapita

Regresi dengan variabel kontrol

Analisis Dampak Belanja Daerah Terhadap Capaian Sektoral

Belanja daerah terlihat berdampak signifikan terhadap capaian sektoral, yaitu pendidikan dan infrastruktur (sub-sektor akses air minum). Namun, hasil ini tidak terlihat pada sektor kesehatan dan sub-sektor infrastruktur dasar lainnya (sanitasi, jalan, dan rumah layak huni).

Dampak Sektoral Belanja per Kapita terhadap Capaian Sektoral, 2017 – 2020

	Pendidikan	Kesehatan			Infrastruktur				
	Angka partisipasi murni [†]	Kelahiran di Fasilitas Kesehatan	Kelahiran dibantu Tenaga Kesehatan	Penggunaan Alat Kontrasepsi	Sanitasi layak	Air Minum Layak	Jalan Kondisi Baik	Panjang Jalan per luas area	Rumah Layak Huni [‡]
Log Belanja Pendidikan per Kapita	239.43*** (67.76)								
Log Belanja Kesehatan per Kapita		420.35 (313.32)	84.45 (285.93)	100.88 (254.32)					
Log Belanja Infrastruktur per Kapita					47.012 (114.69)	303.58*** (65.91)	26.34 (216.61)	1,104.44 (13,164.62)	28.35 (45.36)
Variabel kontrol	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
District fixed effect	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Time fixed effect	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
# dari IV	19	18	16	16	15	19	16	15	18
Nilai Hansen P_	0.09	0.50	0.65	0.57	0.00	0.27	0.00	0.22	0.05
Nilai AR(2) P_	0.36	0.50	0.08	0.83	0.22	0.07	0.12	0.75	0.06
# dari daerah	542	508	508	508	508	508	508	504	508
# dari observasi	2,168	2,032	1996	1,996	1,520	2,031	1,997	1,480	2,032

† Angka Partisipasi Murni (APM) terdiri dari 1) rata-rata APM PAUD – SMP/ sederajat (kabupaten/kota); 2) APM SMA/ sederajat (provinsi).

‡ Persentase Rumah Layak Huni mengacu pada persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni yang memenuhi minimal 6 indikator berikut: 1) luas 7,2 m²; 2) air minum yang layak; 3) Sanitasi yang layak; 4) Bahan atap yang tepat (misalnya dari beton, genteng, dll); 5) Bahan dinding yang tepat (misalnya sebagian besar dari batu bata atau kayu gelondongan); 6) Bahan lantai yang tepat (mis. sebagian besar dari marmer, semen, dll.); 7) Listrik sebagai sumber penerangan utama.

* Variabel kontrol mencakup populasi kayu gelondongan, angka kemiskinan, akses rumah tangga ke listrik, variabel dependen selang waktu dan log PDRB per Kapita (kecuali untuk model terkait infrastruktur yang tidak menggunakan listrik sebagai kendali eksogen).

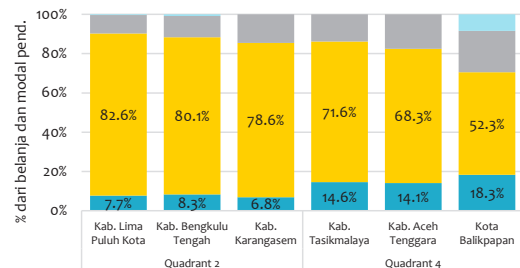
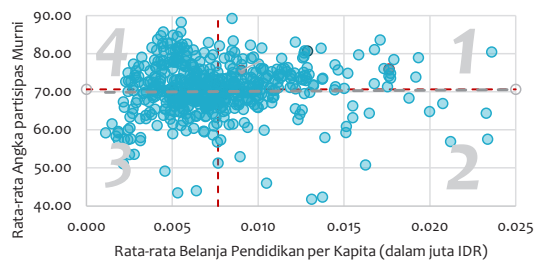
** Seluruh hitungan fiskal ada dalam jangka konstan 2010.



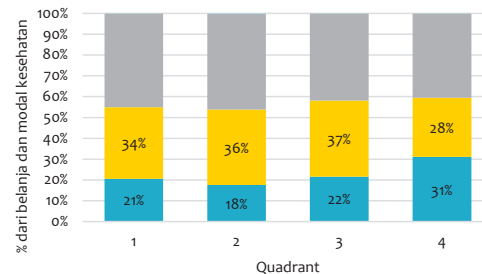
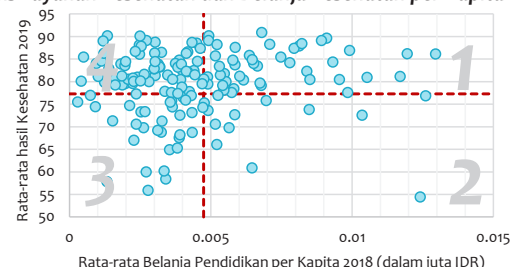
Pola Belanja Daerah Berasosiasi dengan Tingkat Capaian Sektor

Belanja modal menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendorong peningkatan capaian sektoral. Daerah dengan porsi belanja modal yang lebih besar (kuadran 4) cenderung memiliki capaian sektoral yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang mengalokasikan belanja yang modal lebih rendah (kuadran 2), meskipun daerah-daerah di kuadran 2 ini memiliki tingkat belanja yang lebih besar.

Analisis Kuadran:
Hasil Pendidikan dan Belanja Pendidikan per Kapita, 2016 – 2020



Analisis Kuadran:
Indeks Layanan Kesehatan dan Belanja Kesehatan per Kapita



■ Belanja Modal ■ Belanja Pegawai ■ Belanja Barang & Jasa ■ Belanja Barang & Jasa



Rekomendasi Kebijakan

Melakukan penguatan pemantauan terhadap pemenuhan belanja wajib

UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan kenaikan belanja wajib infrastruktur dari sebelumnya 25% DTU (berdasarkan UU APBN Tahun 2017) menjadi 40% dari total anggaran daerah (setelah dikurangi bagi hasil dan TKD ke daerah di bawahnya). Peningkatan ini perlu disertai dengan penguatan pemantauan guna memastikan belanja infrastruktur digunakan untuk penyediaan layanan dasar.

TENGAH BERJALAN
(Memperkuat aturan yang ada)

Menyelaraskan kebijakan belanja daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat

Memperkuat penyalarsan kebijakan belanja daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat/prioritas nasional untuk meningkatkan dampak total belanja daerah terhadap capaian sosial-ekonomi.

SEKARANG
(Kebijakan baru yang perlu disusun segera)

	KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KEMENTERIAN LAINNYA
Melakukan penguatan pemantauan terhadap pemenuhan belanja wajib	+		+	
Menyelaraskan kebijakan belanja daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat	+	+	+	+



Kementerian PPN/
Bappenas



PROSPERA

Program Kemitraan Indonesia
Australia untuk Perekonomian

3

Dampak TKD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Multiplier effect dari belanja daerah pada kinerja perekonomian daerah




Analisis Dampak TKD Terhadap Indikator Ekonomi Makro

Fiscal Multiplier belanja Pemerintah Daerah di Indonesia diperkirakan sebesar 0,78 (berada pada tingkat moderat)

Peningkatan belanja sebesar 1 persen meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,78 persen

- Angka tersebut menempatkan Indonesia di tengah negara-negara lainnya.
- Meskipun nilainya lebih besar dari temuan empiris di Tiongkok dan setara dengan Jepang, multiplier effect di Indonesia masih lebih kecil dari Filipina. Sehingga masih perlu ditingkatkan efektivitas belanjanya.

Estimasi Multiplier Effect Belanja Pemerintah Daerah pada Pertumbuhan PDRB dan Perbandingan Negara, 2017 – 2020

Pertumbuhan Ekonomi Daerah $\Delta PDRB_{it}/PDRB_{it-1}$ †		
Pertumbuhan total belanja ($\Delta G_{it}/GRDP_{it-1}$) †	0.781* (0.425)	0.8 ~ 1.2  Filipina (2009 – 2016)
Variabel Kontrol	Ya	0.8  Jepang (1990 – 2000)
District Fixed Effect	Ya	0.6  Tiongkok (2000 – 2009)
Time Fixed Effect	Ya	
# dari IV	12	
Nilai Hansen P_	0.74	
Nilai AR(2) P_	0.54	
# dari daerah	542	
# dari observasi	2,151	

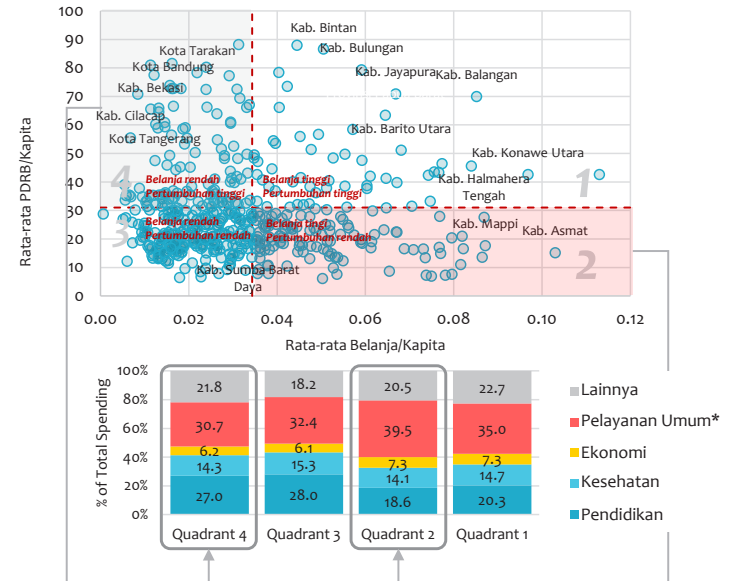
* Variabel kontrol meliputi laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah, persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik, dan shock dummies untuk pertumbuhan ekonomi.

† Pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan total belanja daerah dinyatakan dalam satuan persentase.

** Seluruh hitungan fiskal ada dalam jangka konstan 2010.

Komposisi belanja daerah berkorelasi dengan tingkat PDRB daerah

Rata-rata PDRB/Kapita dan Belanja Pemda per Kapita (juta IDR), 2016 – 2020



* Fungsi yang terkait dengan program penunjang pemerintahan daerah, unsur pendukung pemerintahan, urusan wajib non pelayanan dasar, kepegawaian, pengawasan, dan kekhususan

Semakin rendah belanja pelayanan umum suatu daerah maka semakin baik pertumbuhan ekonominya.

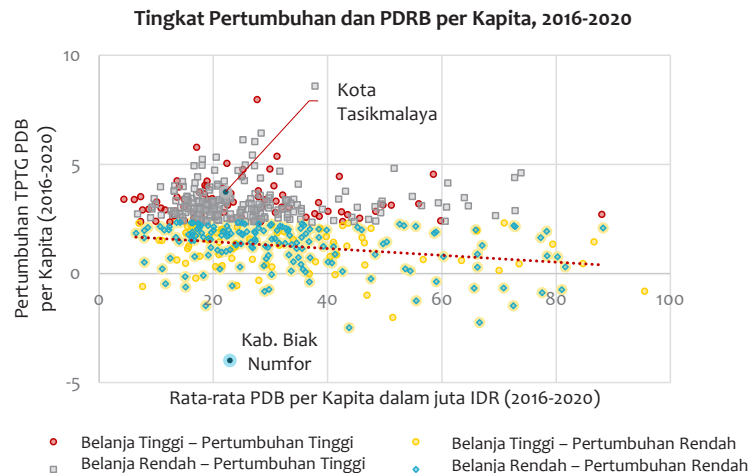
Daerah pada kuadran 4 memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah pada kuadran 2, meskipun dengan tingkat belanja yang lebih rendah, karena memiliki pola belanja yang lebih baik.

Komposisi Belanja yang Berkualitas Berkorelasi dengan Pertumbuhan Ekonomi: Analisis di tingkat Nasional

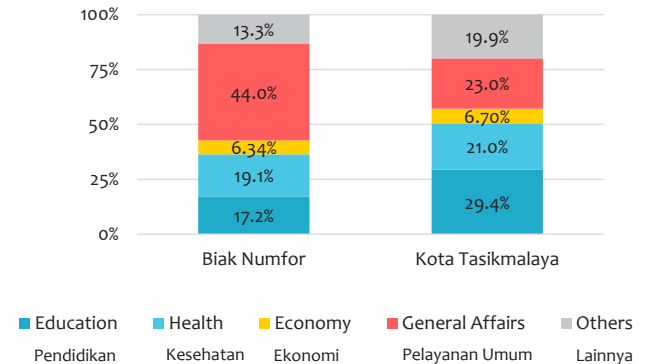
Jika pemerintah daerah mengarahkan belanjanya pada sektor-sektor yang secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang komposisi belanjanya didominasi oleh belanja terkait birokrasi (belanja fungsi pelayanan umum).

Daerah dengan tingkat PDRB/Kapita yang sama akan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jika memiliki komposisi belanja yang tepat.

Biak Numfor dan Kota Tasikmalaya memiliki tingkat PDRB per Kapita yang sama, namun keduanya memperlihatkan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Hal ini diakibatkan perbedaan pola belanja di kedua kabupaten/kota tersebut.

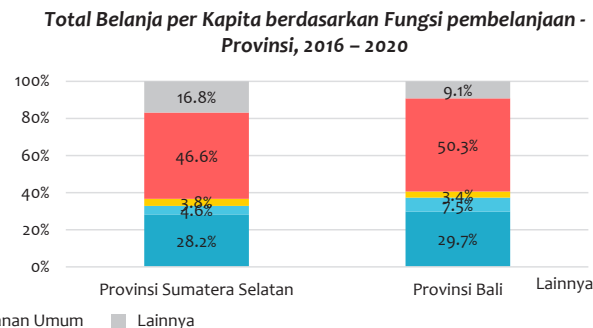
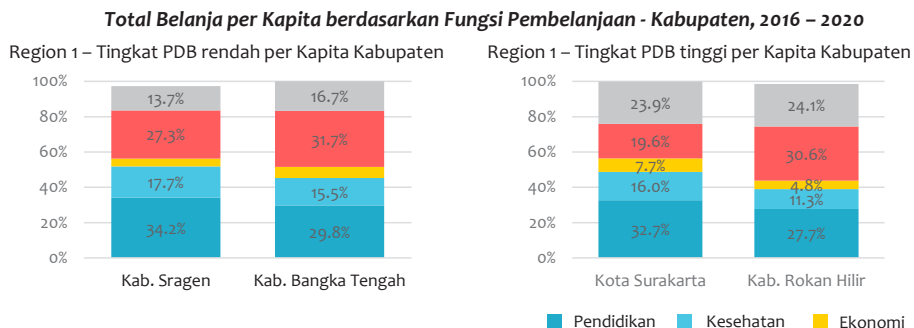
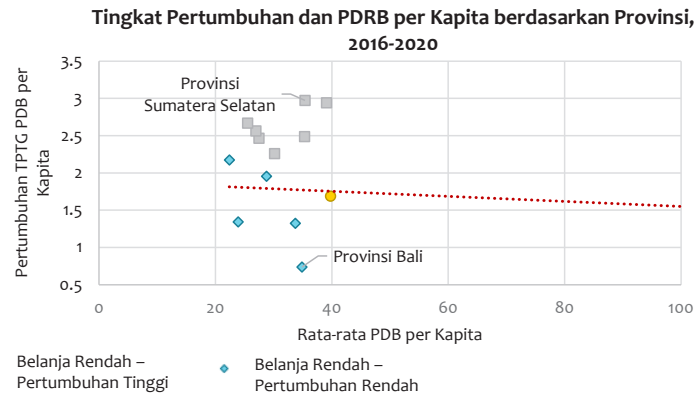
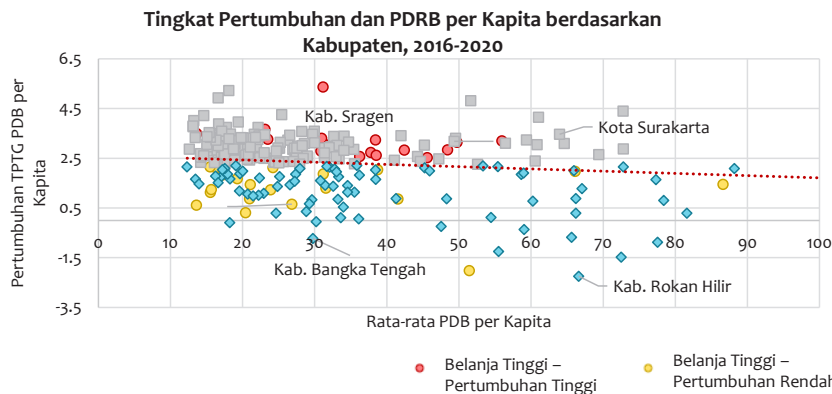


Total Belanja per Kapita berdasarkan Fungsi Pembelanjaan pada Pemda Terpilih, 2016 – 2020



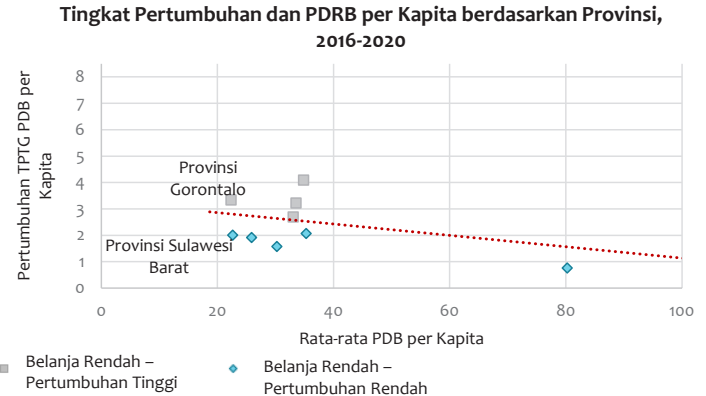
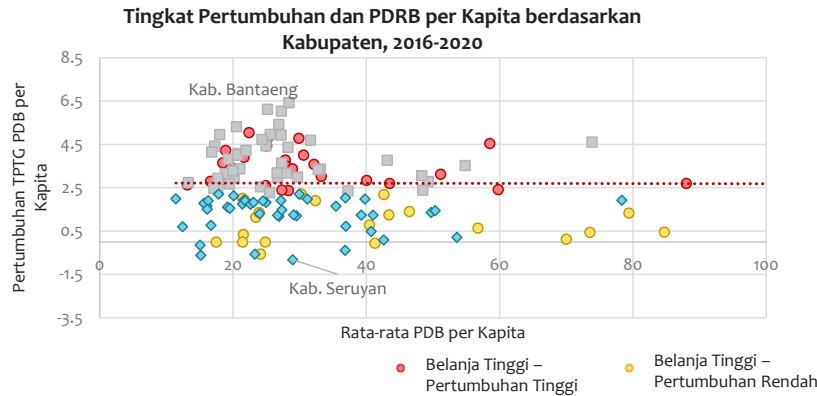
Komposisi Belanja yang Berkualitas Berkorelasi dengan Pertumbuhan Ekonomi : Analisis Regional 1 (Sumatera, Jawa, Bali)

Kabupaten atau provinsi dengan proporsi belanja Pelayanan Umum yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih lambat

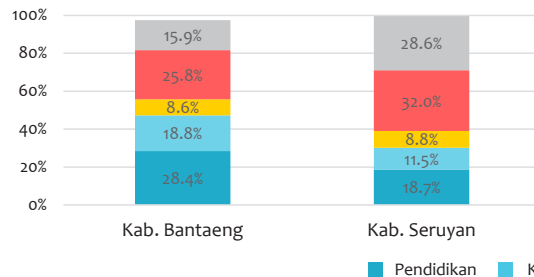


Komposisi Belanja yang Berkualitas Berkorelasi dengan Pertumbuhan Ekonomi : Analisis Regional 2 (Kalimantan, Sulawesi, NTB)

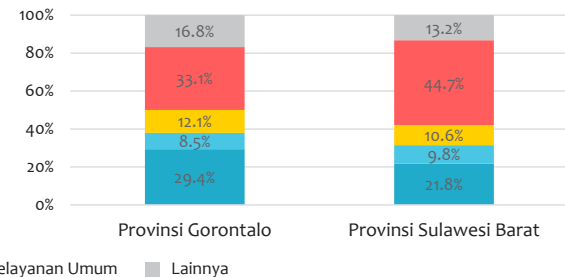
Hasil serupa ditemukan pada Regional 2, dimana kabupaten atau provinsi di Regional 2 dengan proporsi belanja Pelayanan Umum yang lebih tinggi cenderung mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih rendah



Total Belanja per Kapita berdasarkan Fungsi Pembelanjaan - Kabupaten, 2016 – 2020

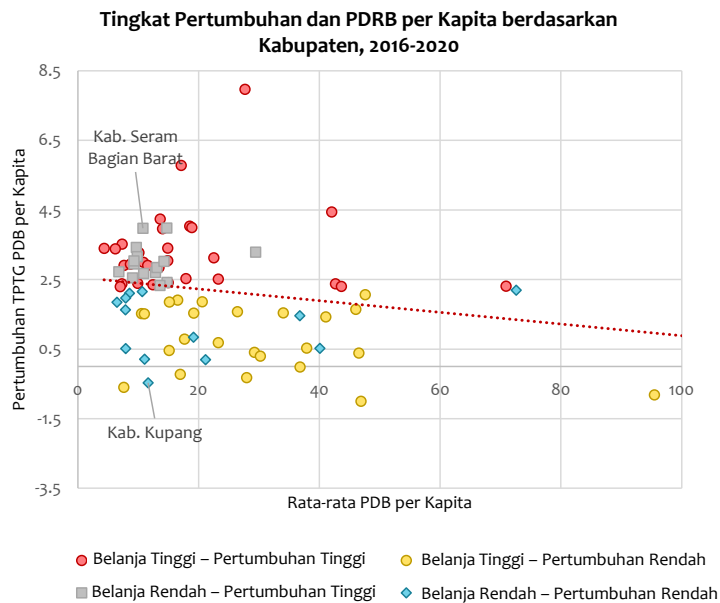


Total Belanja per Kapita berdasarkan Fungsi pembelanjaan - Provinsi, 2016 – 2020

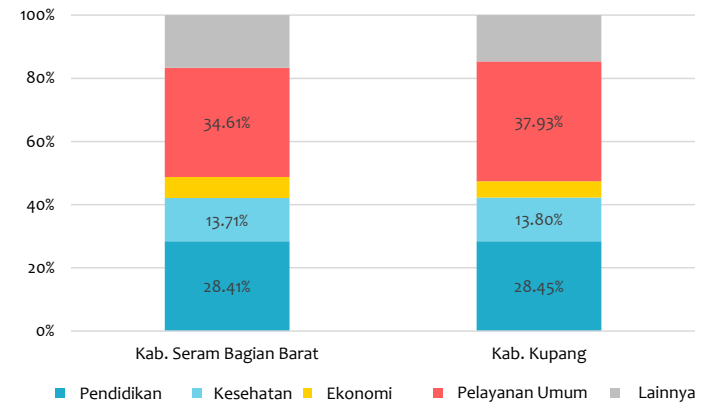


Komposisi Belanja yang Berkualitas Berkorelasi dengan Pertumbuhan Ekonomi : Analisis Regional 3 (NTT, Maluku, Papua)

Hasil analisis pada Regional 3 konsisten dengan hasil-hasil sebelumnya, dimana kabupaten atau provinsi dengan proporsi belanja Pelayanan Umum yang lebih tinggi cenderung mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih lambat



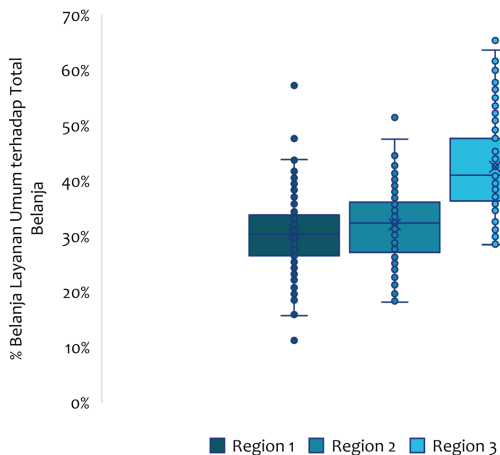
Total Belanja per Kapita berdasarkan Fungsi Pembelanjaan – Kabupaten, 2016 – 2020



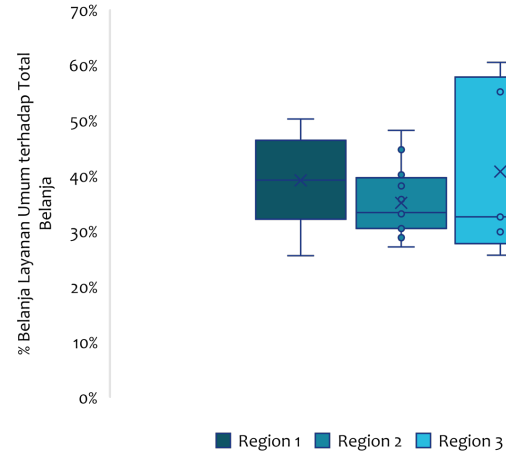
Komposisi Belanja yang Berkualitas Berkorelasi dengan Pertumbuhan Ekonomi : Perbandingan antar Regional

- Secara rata-rata, **kabupaten di Region 1 memiliki kinerja yang lebih baik** dibandingkan dengan daerah lain yang ditunjukkan oleh rendahnya proporsi belanja fungsi Pelayanan Umum.
- Sebaliknya, **untuk tingkat provinsi, Region 2 menunjukkan kinerja yang lebih baik** yang ditunjukkan dengan proporsi belanja Urusan Umum yang lebih rendah

Rata-rata belanja layanan umum per Kapita, **Kabupaten**
(% Total Belanja)



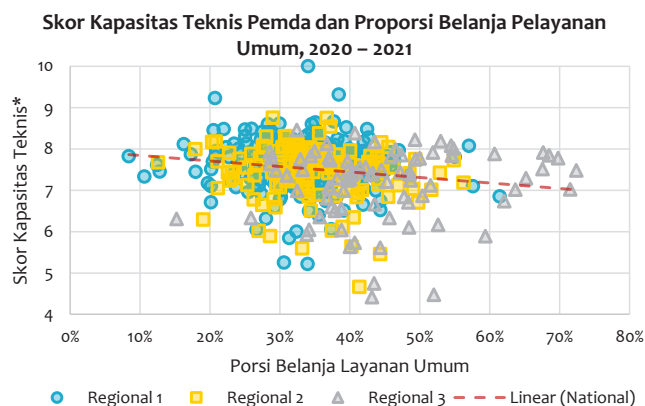
Rata-rata belanja layanan umum per Kapita, **Provinsi**
(% Total Belanja)



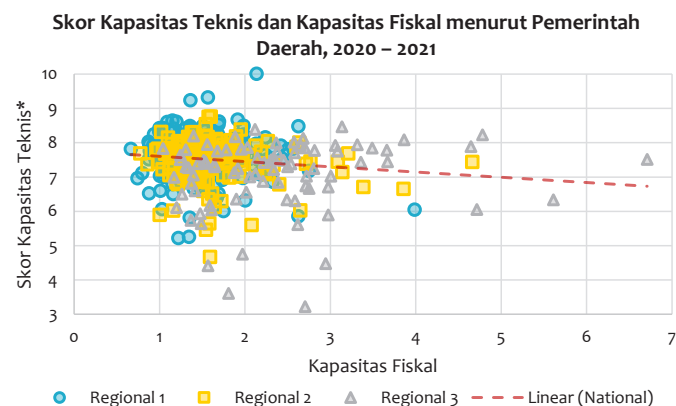
- **Regional 1:** Sumatra, Jawa, dan Bali
- **Regional 2:** Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat
- **Regional 3:** Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua

Komposisi Belanja yang Berkualitas Memiliki Korelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang Baik: Analisis kapasitas teknis daerah

- Pemerintah daerah dengan skor kapasitas teknis yang rendah memiliki karakteristik porsi tingkat belanja pelayanan umum yang tinggi meskipun kapasitas fiskalnya lebih besar. Hal ini memperlihatkan daerah-daerah dengan porsi belanja birokrasi yang lebih besar memiliki kemampuan fiskal yang tinggi, namun dengan kapasitas yang relatif lebih rendah.



Daerah 1: Sumatra, Jawa, dan Bali
Daerah 2: Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat
Daerah 3: Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua



Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, 2023 – Analisis Prospera

* Skor kapasitas teknis **diestimasi menggunakan skor evaluasi kinerja DAK Fisik** yang dihitung oleh Ditjen Perimbangan Keuangan dan Prospera (2023). Indikator ini merupakan indeks gabungan yang bertujuan untuk **mengukur kinerja pemerintah daerah dalam membelanjakan anggaran DAK Fisik** seperti, (i) **realisasi anggaran**, (ii) **realisasi output**, (iii) **kepatuhan terhadap pedoman**, dan (iv) **nilai efisiensi belanja**.



Rekomendasi Kebijakan

Mendorong peningkatan proporsi belanja terkait pelayanan publik

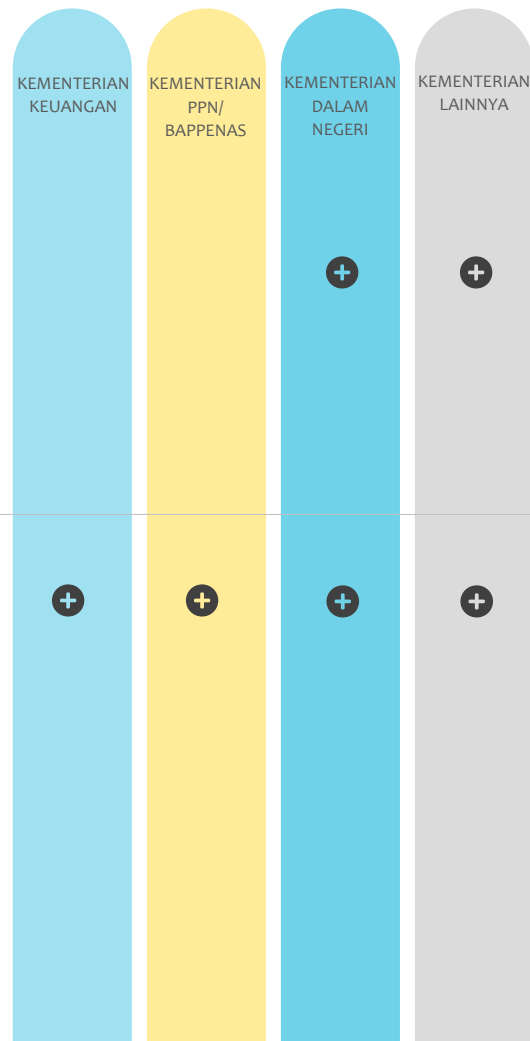
Memberikan batasan porsi belanja birokrasi dan memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk mampu mengidentifikasi pos-pos belanja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

TENGAH BERJALAN
(Memperkuat aturan yang ada)

Membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi belanja ke daerah untuk memastikan efektivitas belanja daerah

Memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada belanja daerah guna memastikan efektivitas belanja terhadap perekonomian daerah.

SEKARANG
(Kebijakan baru yang perlu disusun segera)





Kementerian PPN/
Bappenas



PROSPERA

Program Kemitraan Indonesia
Australia untuk Perekonomian

Lampiran

Menganalisis dampak transfer pada indikator sosial ekonomi

Langkah selanjutnya – menghubungkan model dan lebih banyak informasi terkait konvergensi

1 Dampak terhadap belanja pada target nasional

Dampak Belanja Pemerintah Daerah terhadap IPM:

- Model ini akan menggunakan spesifikasi yang sama dengan estimasi Pengganda Fiskal Pemerintah Daerah untuk melihat **dampak** dari total belanja Pemerintah Daerah terhadap IPM.
- Model ini akan **menghubungkan lebih banyak analisis strategis** terkait dampak belanja terhadap indikator sosial ekonomi ke model yang lebih rinci yang mengevaluasi belanja dan hasil sektoral.

Dampak dari indeks gabungan sektoral Pemerintah Daerah:

- Atau, **estimasinya dapat menggunakan indeks gabungan** dengan memakai PCA dari berbagai variabel hasil untuk menghasilkan analisis dampak yang lebih agregat.
- Meskipun indeks gabungan lebih sulit untuk diinterpretasikan, indeks ini lebih terkait dengan analisis sektoral.

2 Slide mengenai kualitas belanja dan analisis konvergensi

- Dengan tidak adanya data rinci dan keterbatasan waktu dalam menghitung potensi pertumbuhan masing-masing Pemerintah Daerah yang menggunakan metode akuntansi pertumbuhan/*growth accounting*, **pendekatan alternatif** dengan menggunakan teori konvergensi digunakan.
- Teori dapat melihat apakah daerah yang kurang berkembang cenderung akan “mengejar” daerah yang lebih maju.
- Belanja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk melihat apakah perilaku belanja yang berbeda dapat menjelaskan mengapa beberapa daerah dapat mengejar ketertinggalan sementara yang lain tidak.

Akan diestimasi terlebih dahulu sebelum memilih mana yang lebih baik

Dampak Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya

Hasil Estimasi Belanja Pemerintah Daerah pada IPM, 2017 – 2021

	Indeks Pembangunan Manusia			
	Semua Daerah	Daerah 1	Daerah 2	Daerah 3
Log Belanja per Kapita (lag 1)	3.09 (5.165)	0.63 (2.781)	0.74 (4.125)	1.87 (2.194)
Indeks Pembangunan Manusia (lag 1)	0.97*** (0.015)	0.419*** (0.032)	0.97*** (0.014)	0.726*** (0.075)
Log Populasi	0.094 (0.099)	-3.63 (0.782)	0.076 (0.100)	-1.085 (1.071)
angka kemiskinan	-0.008 (0.005)	-0.018 (0.011)	-0.002 (0.005)	-0.052*** (0.016)
Persentase RT dengan Akses ke Listrik	0.003 (0.002)	0.006 (0.008)	0.014*** (0.004)	0.003 (0.002)
Log PDRB per Kapita	0.011 (0.124)	0.161** (0.073)	0.05 (0.095)	0.182 (0.196)
Variabel kontrol	Ya	Ya	Ya	Ya
District fixed effect	Ya	Ya	Ya	Ya
Time fixed effect	17	17	17	14
# dari IV	0.74	0.1	0.1	0.95
Nilai Hansen P_	0.54	0.1	0.1	0.76
Nilai AR(2) P_	508	276	147	85
# dari daerah	2,029	1,104	585	255

** Seluruh hitungan fiskal ada dalam jangka konstan 2010.

Estimasi Belanja Pemerintah Daerah pada Komponen HDI, 2017 – 2021

	Komponen Indeks Pembangunan Manusia		
	Angka Harapan Hidup	Rerata Partisipasi Sekolah	Belanja Rumah Tangga Tahunan per kapita (dalam log)
Log Belanja per Kapita	1.23 (1.670)	0.421 (0.943)	0.933** (0.38)
Harapan Hidup (lag 1)	0.955*** (0.035)		
Rerata Partisipasi Sekolah (lag 1)		0.976*** (0.028)	
Belanja RT Tahunan per Kapita (lag 1)			1.039*** (0.041)
Log Populasi	0.345 (0.376)	-0.024 (0.025)	0.02*** (0.007)
angka kemiskinan	-0.03* (0.005)	-0.001 (0.004)	-0.001*** (0.000)
Persentase RT dengan Akses ke Listrik	0.001 (0.001)	0.002* (0.001)	0.000 (0.000)
Log PDRB per Kapita	0.064 (0.120)	0.013 (0.031)	0.024** (0.011)
Variabel kontrol	Ya	Ya	Ya
District fixed effect	Ya	Ya	Ya
Time fixed effect	Ya	Ya	Ya
# dari IV	Ya	Ya	Ya
Nilai Hansen P_	0.74	0.1	0.1
Nilai AR(2) P_	0.54	0.96	0.20
# dari daerah	508	508	508
Variabel kontrol	1,521	2,029	2,029

** Seluruh hitungan fiskal ada dalam jangka konstan 2010.



**Kementerian PPN/
Bappenas**



PROSPERA

Program Kemitraan Indonesia
Australia untuk Perekonomian